



**DAFTAR  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2025**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR (KOMISI I)	
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR (KOMISI II)	
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR (KOMISI III)	
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR (KOMISI IV)	
5.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR (KOMISI IV)	
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR (KOMISI V)	
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR (KOMISI VI)	
8.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999	DPR (KOMISI VI)	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		
9.	RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	DPR (KOMISI VII)	<i>Operan (Carry Over)</i>
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	DPR (KOMISI VIII)	
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR (KOMISI VIII)	
12.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR (KOMISI IX)	
13.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR (KOMISI X)	
14.	RUU tentang Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> )	DPR (KOMISI XI)	
15.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR (KOMISI XII)	<i>Operan (Carry Over)</i>
16.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR (KOMISI XIII)	
17.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang	DPR (BADAN LEGISLASI)	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI		
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR (BADAN LEGISLASI)	
19.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR (BADAN LEGISLASI)	
20.	RUU tentang Pertekstilan	DPR (BADAN LEGISLASI)	
21.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	
22.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (BADAN LEGISLASI)	
23.	RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern	DPR (BADAN LEGISLASI)	
24.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	DPR (BADAN LEGISLASI)	
25.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	DPR (BADAN LEGISLASI)	<i>Operan (Carry Over)</i>
26.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang	DPR	

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN</b>
	Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	(BADAN LEGISLASI)	
27.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR (BADAN LEGISLASI)	
28.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR (BADAN LEGISLASI)	
29.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
30.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	DPR (ANGGOTA)	
31.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
32.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
33.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	<i>Operan (Carry Over)</i>
34.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH	<i>Operan (Carry Over)</i>
35.	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
36.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	
37.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	PEMERINTAH	<i>Operan (Carry Over)</i>
38.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	
39.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	PEMERINTAH	
40.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran		
41.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	

<b>DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA</b>	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain: a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian b. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( <i>Carry over</i> )
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang



**DAFTAR RUU PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2025—2029**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN/ USULAN RUU</b>
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR	
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR	
5.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	DPR	
6.	RUU tentang Perkumpulan	DPR	
7.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR	
9.	RUU tentang Sistem Tata Produksi dan Niaga Pangan	DPR	
10.	RUU tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Hewan	DPR	
11.	RUU tentang Pertanian	DPR	
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	DPR	
13.	RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR	
14.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	DPR	
15.	RUU tentang Pertekstilan	DPR	
16.	RUU tentang Sandang	DPR	
17.	RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia	DPR	
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR	
19.	RUU tentang Bank Makanan	DPR	
20.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR	
21.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR	

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN/ USULAN RUU</b>
22.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR	
23.	RUU tentang Kefarmasian	DPR	
24.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	DPR	
25.	RUU tentang Pendidikan dan Layanan Kedokteran Hewan	DPR	
26.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	DPR	
27.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR	
28.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR	
29.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR	
30.	RUU tentang Permuseuman	DPR	
31.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	DPR	
32.	RUU tentang Penghapusan Piutang Negara	DPR	
33.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR	
34.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15	DPR	



NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan		
35.	RUU tentang Investasi Negara	DPR	
36.	RUU tentang Profesi Kurator	DPR	
37.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR	
38.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	DPR	
39.	RUU tentang Pidana Tutupan	DPR	
40.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR	
41.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	DPR	
42.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten	DPR	
43.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara	DPR	
44.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang	DPR	
45.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	DPR	<i>Omnibus</i> (Klaster Pendidikan Kedokteran dan Klaster Pelayanan Kesehatan/Obat)

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN/ USULAN RUU</b>
46.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR	
47.	RUU tentang Boikot, Divestasi, dan Sanksi	DPR	
48.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR	
49.	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR	
50.	RUU tentang Penyadapan	DPR	
51.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR	
52.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	DPR	
53.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR	
54.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	
55.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR	
56.	RUU tentang Komoditas Khas	DPR	
57.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	DPR	
58.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Harmonisasi Peraturan Perpajakan		
59.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	DPR	
60.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR	
61.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria	DPR	
62.	RUU tentang Pengelolaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Moda Transportasi	DPR	
63.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR	
64.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR	
65.	RUU tentang Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> )	DPR	
66.	RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern	DPR	
67.	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR	
68.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN/ USULAN RUU</b>
69.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
70.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
71.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika dan Psikotropika)	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
72.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
73.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
74.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	DPR/ PEMERINTAH	
75.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	DPR/ PEMERINTAH	
76.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	DPR/ PEMERINTAH	
77.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara)	DPR/ PEMERINTAH	
78.	RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)	DPR/ PEMERINTAH	

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN/ USULAN RUU</b>
79.	RUU tentang Grasi (RUU tentang Grasi, Amnesti, dan Abolisi)	DPR/ PEMERINTAH	
80.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	DPR/ PEMERINTAH	
81.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR/ PEMERINTAH	
82.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR/ PEMERINTAH	
83.	RUU tentang Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana)	DPR/ PEMERINTAH	
84.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (RUU tentang Desain Industri)	DPR/ PEMERINTAH	
85.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	DPR/ PEMERINTAH	
86.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ RUU tentang Hukum Acara Sengketa Informasi	DPR/ PEMERINTAH	
87.	RUU tentang Penyesuaian Pidana/ RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah	DPR/ PEMERINTAH	
88.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
89.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	DPR/DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
90.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR/DPD	
91.	RUU tentang Pertanahan	DPR/DPD	
92.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	DPR/DPD	
93.	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/DPD	
94.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR/DPD	
95.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPR/DPD	
96.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang	DPR/DPD	

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN/ USULAN RUU</b>
	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani		
97.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/DPD	
98.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR/DPD	
99.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR/DPD	
100.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/DPD	
101.	RUU tentang Sumber Daya Genetik	DPR/DPD	
102.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/DPD	
103.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	DPR/DPD	
104.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPR/DPD	
105.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
106.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/DPD	
107.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/DPD	
108.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/DPD	
109.	RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	DPR/DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
110.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	DPR/DPD	
111.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR/DPD	
112.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/DPD	
113.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR/DPD	
114.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang	DPR/DPD	



NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Ketenagakerjaan/RUU tentang Sistem Pengupahan		
115.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR/DPD	
116.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/DPD	
117.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR/DPD	
118.	RUU tentang Kesehatan Masyarakat	DPR/DPD	
119.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/DPD	
120.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR/DPD	
121.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR/DPD	
122.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	DPR/DPD	
123.	RUU tentang Ekonomi Syariah	DPR/DPD	
124.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	DPR/DPD	

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN/ USULAN RUU</b>
125.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR/DPD	
126.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR/DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
127.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR/DPD	
128.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	DPR/DPD	
129.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	DPR/DPD	
130.	RUU tentang Geologi	DPR/DPD	
131.	RUU tentang Keanekaragaman Hayati	DPR/DPD	
132.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim/RUU tentang Perubahan Iklim/RUU tentang Keadilan Iklim/ RUU tentang Perubahan Iklim	DPR/DPD	
133.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR/DPD	
134.	RUU tentang Kewirausahaan/ RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR/DPD	
135.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/DPD	
136.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/DPD	

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN/ USULAN RUU</b>
137.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPR/DPD	
138.	RUU tentang Pembangunan Keluarga Berkualitas/RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR/DPD	
139.	RUU tentang Sistem Transportasi dan Logistik Nasional/RUU tentang Sistem Jaringan Transportasi Nasional/RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/DPD	
140.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ RUU tentang Jaminan Sosial Pekerja Rentan	DPR/DPD	
141.	RUU tentang Sistem Transportasi dan Logistik Nasional/RUU tentang Sistem Jaringan Transportasi Nasional/RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/DPD	
142.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPR/DPD	
143.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPR/DPD	
144.	RUU tentang Kesetaraan Gender	DPR/DPD	
145.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR/DPD	
146.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43	DPR/DPD	

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN/ USULAN RUU</b>
	Tahun 2008 tentang Wilayah Negara		
147.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara	DPR/DPD	
148.	RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	PEMERINTAH/DPD	
149.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	PEMERINTAH/DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
150.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal	PEMERINTAH	
151.	RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional	PEMERINTAH	
152.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	PEMERINTAH	
153.	RUU tentang Badan Usaha	PEMERINTAH	
154.	RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	PEMERINTAH	
155.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	PEMERINTAH	
156.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	PEMERINTAH	
157.	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH	
158.	RUU tentang Perlelangan	PEMERINTAH	

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN/ USULAN RUU</b>
159.	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH	
160.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	PEMERINTAH	
161.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	
162.	RUU tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH	
163.	RUU tentang Persandian	PEMERINTAH	
164.	RUU tentang Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana	PEMERINTAH	
165.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	PEMERINTAH	
166.	RUU tentang Jaminan Benda Bergerak	PEMERINTAH	
167.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH	
168.	RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	DPD	
169.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD	
170.	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPD	
171.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Daerah	DPD	
172.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21	DPD	

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN/ USULAN RUU</b>
	Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh		
173.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD	
174.	RUU tentang Ketransmigrasian	DPD	
175.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	DPD	
176.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD	
177.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD	
178.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD	

<b>NO</b>	<b>DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA</b>
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang